

PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Komarudin¹, Nur Hotami², Muhammad Nabil Zulkarnain³, Hj. Mukhlisatul Jannah⁴
Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten

231410091.komarudin@uinbanten.ac.id, 231410093.nurhotami@uinbanten.ac.id,
231410092.mnabilzulkarnaen@uinbanten.ac.id, mukhlisatul.jannah@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

With the rapid growth of the global economy, there are many financial companies in Indonesia, both bank-based and non-bank-based. With this development, the Muslim community began to question the existence and operation of financial institutions. Shariah-based financial institutions were established because the Muslim community was skeptical of the operations of conventional financial institutions. However, as Islamic financial institutions developed rapidly, the community began to treat their accounting like conventional financial institutions, which prompted the establishment of an Islamic accounting system. The author uses a research study method that collects information from books and scientific journals to discuss the Islamic accounting system in Islamic insurance in this context. The results of the discussion show that Islamic accounting is a process that refers to Islamic law to record, classify, process, and report the finances of a company during a certain period of time. The principle of fairness is used in the accounting system of sharia-based insurance. Islamic accounting focuses on the principles of sharia, distinguishing it from general accounting. In Islamic insurance, premiums received before the transaction date are recognized in the financial statements of the following period. The author concludes from these findings that Islamic insurance has used accounting in accordance with Islamic law, namely sharia accounting. In preparing financial statements for Islamic institutions such as Islamic insurance, Islamic accounting is very important. We can make better reports by better understanding the concept of Islamic accounting.

Keywords: *Islamic accounting, Islamic insurance, Islamic principles, Implementation challenges, Industry growth*

ABSTRAK

Dengan pertumbuhan ekonomi global yang cepat, banyak perusahaan keuangan di Indonesia, baik yang berbasis bank maupun non-bank. Dengan perkembangan ini, masyarakat Muslim mulai mempertanyakan keberadaan dan operasi lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang berbasis syariah didirikan karena masyarakat Muslim ragu terhadap operasi lembaga keuangan konvensional. Namun, karena lembaga keuangan syariah berkembang dengan cepat, masyarakat mulai memperlakukan akuntansinya seperti lembaga keuangan

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

konvensional, yang mendorong pembentukan sistem akuntansi syariah. Penulis menggunakan metode studi penelitian yang mengumpulkan informasi dari buku dan jurnal ilmiah untuk membahas sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah dalam konteks ini. Hasil diskusi menunjukkan bahwa akuntansi syariah adalah proses yang mengacu pada hukum Islam untuk mencatat, mengklasifikasikan, memproses, dan melaporkan keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Prinsip keadilan digunakan dalam sistem akuntansi asuransi berbasis syariah. Akuntansi syariah berfokus pada prinsip-prinsip syariah, membedakannya dari akuntansi umum. Dalam asuransi syariah, premi yang diterima sebelum tanggal transaksi diakui dalam laporan keuangan periode berikutnya. Penulis mengambil kesimpulan dari temuan ini bahwa asuransi syariah telah menggunakan akuntansi yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu akuntansi syariah. Dalam penyusunan laporan keuangan untuk lembaga syariah seperti asuransi syariah, akuntansi syariah sangat penting. Kami dapat membuat laporan yang lebih baik dengan lebih memahami konsep akuntansi syariah.

Kata kunci: Akuntansi syariah, Asuransi syariah, Prinsip syariah, Tantangan implemementasi, Pertumbuhan industri

PENDAHULUAN

Karena kemunculan teknologi modern seiring dengan perkembangan ekonomi global dari waktu ke waktu, kita telah menyaksikan perubahan dan kemajuan. Perkembangan teknologi ini memiliki dampak yang sangat beragam, membawa banyak manfaat dan tantangan, sehingga sulit untuk membedakan mana yang baik mana. Teknologi memiliki manfaat, tetapi ia juga dapat menyesatkan. Kemajuan ekonomi yang didorong oleh teknologi dapat berdampak pada masyarakat, terutama dalam hal disparitas ekonomi. Beberapa aktivitas perekonomian dilarang, terutama yang mengandung kezaliman, ketidakadilan, atau yang dapat merugikan banyak orang, seperti yang terjadi pada perusahaan atau lembaga keuangan, karena hukum Islam menganggapnya sebagai fitrah manusia.

Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi, setiap perusahaan, terutama perusahaan jasa keuangan (baik perbankan maupun non-perbankan), harus menyusun laporan yang menunjukkan kondisi keuangan mereka selama periode tertentu, biasanya pada akhir bulan atau tahun. Akuntansi adalah pekerjaan menulis yang mengumpulkan data tentang keuangan perusahaan. Informasi ini berasal dari proses akuntansi dan tujuan dari akuntansi.

Selain itu, asuransi syariah harus menyusun laporan keuangan mereka sebagai lembaga keuangan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK 108. Sangat penting bagi bisnis untuk memahami pentingnya akuntansi, terutama dalam asuransi syariah yang bertujuan untuk membangun kepercayaan nasabah. Namun, pertumbuhan pesat asuransi syariah tidak diimbangi oleh faktor lain, seperti kekurangan tenaga kerja yang ahli dalam bidang syariah, yang menyebabkan banyak nasabah tidak memahami konsep yang ada, terutama yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian asuransi syariah. Oleh karena itu, peraturan akuntansi Dewan Syariah Nasional nomor 21 tahun 2001 dibuat untuk perusahaan asuransi berbasis

syariah di Indonesia. Ketentuan ini memastikan bahwa asuransi sesuai dengan PSAK No. 108 dan memastikan bahwa akuntansi syariah sesuai dengan syariat Islam.¹

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif atau metode kajian pustaka dalam penelitian ini. Hasil penelitian mereka diperoleh dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul artikel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pemahaman konsep dasar akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan prinsip prinsip akuntansi syariah di indonesia (RM 1)

Sebenarnya, akuntansi syariah adalah konsep yang sama seperti akuntansi konvensional, tetapi didasarkan pada prinsip syariah. Akuntansi syariah juga menggunakan istilah-istilah yang berbeda dengan akuntansi konvensional, seperti akad, bai'al dayn (pengajuan kredit), hiwalah (pemindahan piutang), ijarah (sewa), mudharabah, dll.

Akuntansi syariah di Indonesia telah berkembang dengan cepat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan bisnis syariah. Ini telah terjadi sejak munculnya lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 hingga pernyataan standar akuntansi syariah (PSAKS) terakhir yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2016. Karena lingkungan bisnis syariah akan berkembang dengan cepat, para pelaku akuntansi membutuhkan teori akuntansi syariah yang kuat. Menurut Mulawarman (2009), prinsip akuntansi syariah telah diciptakan oleh beberapa akademisi Indonesia seperti Sofyan Syafriz Harahap, Iwan Triyuwono, Aji Dedi Mulawarman, dan IAI. Prinsip-prinsip ini terbagi menjadi dua aliran besar: pragmatis yang bersifat induktif diwakili oleh Sofyan Sjafriz Harahap dan IAI, dan idealis yang bersifat deduktif diwakili oleh Iwan Triyuwono dan Aji Dedi Mulawarman. (Mulawarman, A. (2009). Akuntansi Syariah dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.)

Prinsip Akuntansi Syariah

Berdasarkan Surat Al Baqarah 282:

1. Pertanggungjawaban (Accountability) Konsep pertanggungjawaban (accountability) sangat umum di kalangan orang-orang yang beragama Islam. Konsep amanah selalu terkait dengan pertanggungjawaban. Menurut kaum muslim, masalah amanah adalah hasil dari hubungan manusia dengan Sang Khalik sejak awal alam.
2. Prinsip Keadilan: Dalam akuntansi, ayat 282 surah Al-Baqarah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, perusahaan harus mencatat total transaksi sebesar Rp. 265 juta. Secara sederhana, ini berarti bahwa setiap transaksi tanpa cela dalam akuntansi perusahaan.
3. Prinsip Kebenaran: Tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Sebagai contoh, kami selalu menghadapi masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Didasarkan pada nilai kebenaran, tindakan ini akan berhasil. Kebenaran ini dapat membantu mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi sebagai transaksi yang adil.²

¹ Kasim, A. (2021). Penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di indonesia. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 1-10. Hal 2

² Gaswira, L., & Nabila, A. (2023). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DI INDOENSIA. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(5), 264-270. Hal 4

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), "penerapan prinsip syariah" berarti menerapkan, mempraktekkan suatu teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan kelompok atau individu yang sudah direncanakan sebelumnya.

Prinsip syariah

Hukum Islam membentuk aturan perjanjian. Lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada hukum Islam akan menekankan keadilan dan kejujuran dalam transaksi dan investasi, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi, dan mencegah tindakan dan pikiran spekulatif yang berasal dari berbagai transaksi islam sebagai dasar. Islam memiliki tiga komponen utama, yaitu

1. Aqidah, atau tauhid, berasal dari kata "terikat". Akidah secara umum didefinisikan sebagai keyakinan yang sudah tertanam di dalam hati. Dalam bahasa Arab, "aqidah" berarti dua sisi yang saling terkait dan kuat, yang berarti perjanjian yang kuat dan teguh yang tertanam di dalam hati.
2. Syariah adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Syariah Islam mencakup aturan atau peraturan tentang cara menjalankan dan mengamalkan agama Allah SWT.
3. Seseorang dapat mengatakan bahwa akhlak adalah akhlak Islami, yaitu akhlak yang berasal dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Istilah "akhlak" berasal dari kata "tabiat", "perangai", "adat", "kejadian", "buatan", atau "ciptaan."

Landasan Prinsip Syariah

Islam memiliki landasan ajaran yang jelas, sehingga menjadi ajaran yang mengatur semua aspek kehidupan. Sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Salah satu kitab suci utama dalam agama islam adalah Al-Qur'an, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT.
2. As-Sunnah, yang biasanya disebut Hadist, berarti dekat, baru, dan berita. Sunnah adalah sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an.
3. Menurut istilah ushul fiqh, "ijma'" berarti kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' setelah Rasulullah wafat.
4. Qiyas adalah penetapan hukum dan perkara baru yang belum ada sebelumnya tetapi memiliki sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek yang mirip dengan yang terdahulu, sehingga dihukumi dengan cara yang sama.

Asuransi Syariah

Menurut Rahmawati (2019:14), asuransi adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak; satu disebut penanggung, dan yang lain disebut tertanggung.

Asuransi Syariah, juga dikenal sebagai ta'min, takaful, atau tadhmun, adalah usaha untuk melindungi dan membantu sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberukan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama asuransi syariah adalah ta'awanu 'ala al birra wa altaqwa, yang berarti tolonglah kami semua dalam kebaikan, dan takwa dan al-ta'min, yang berarti rasa aman, menurut Zajuli dan Januari (2002). Prinsip dasar asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Setiap struktur syariat islam bergantung pada tauhid, atau kesatuan.
2. Keadilan (Keadilan)—Prinsip kedua dari kontrak asuransi adalah bahwa nilai-nilai keadilan harus diterapkan antara pihak-pihak yang terikat dengan kontrak asuransi.
3. Semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota merupakan dasar dari prinsip-prinsip dasar lainnya dalam melaksanakan kegiatan berasuransi.

4. Dalam literatur ekonomi Islam, prinsip kerja sama selalu ada. Sebagai makhluk sosial dan individu, manusia memiliki dua wajah yang tidak dapat dipisahkan: sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.
5. Amanah Perusahaan asuransi harus memberi nasabah kesempatan yang besar untuk mengakses laporan keuangan mereka. Laporan keuangan perusahaan asuransi harus mencerminkan prinsip kebenaran dan keadilan baik dalam transaksi maupun melalui auditor publik.
6. Kerelaan (Al-Ridha) Wildawati (2016) menjelaskan bahwa setiap anggota (nasabah) asuransi dimotivasi untuk merelakan premi atau dana yang diberikan oleh perusahaan asuransi, yang bertindak sebagai dana sosial.
7. Larangan riba melarang menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian didasarkan pada persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada peminjam.
Larangan Maisir (Judi) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau untung-untungan yang dilakukan antara dua atau lebih pihak, dengan asumsi bahwa pihak yang menang akan menerima pembayaran atau keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Disebabkan banyaknya nilai-nilai yang sangat tidak bermanfaat (mudharat) Baik hukum Islam maupun KUHP sangat melarang maisir.
8. Larangan Gharar adalah bentuk keraguan, penipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.³

Perjanjian Asuransi Syariah

Dalam ekonomi syariah, mekanisme akad digunakan untuk melaksanakan konsep perjanjian asuransi syariah. Sistem ini sangat rinci untuk menghindari transaksi yang tidak jelas. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi harus menetapkan perjanjian yang akan membuat transaksi jelas dan mencegah mereka berbeda. Menurut Yuldi Ari (Arisandi, 2016), asuransi syariah merupakan bagian dari studi ekonomi islam, dan karena itu harus mematuhi aturan syariah. Itu membedakannya dari asuransi biasa.

Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia (RM 2)

Konsep Asuransi Syariah Indonesia

Berdasarkan Prinsip Syariah: Keadilan, Kejujuran, dan Kerja Sama Dalam kenyataannya, istilah mudharabah, yang berarti "bersama-sama memiliki", dan takaful, yang berarti "saling membantu", adalah konsep yang membedakan asuransi syariah. Dalam konsep takaful, setiap nasabah membayar iuran ke pool takaful; dalam hal ini, pool takaful bertindak sebagai penjamin bagi nasabah.

Namun, Konsep asuransi syariah di Indonesia sangat berbeda dengan konsep asuransi konvensional karena konsumen membayar premi dan pihak yang memiliki modal membantu nasabah mengelola bisnis. Dalam konsep mudharabah, nasabah bekerja sama dengan pihak yang memiliki modal untuk mengelola bisnis, dan nasabah menerima bagian dari keuntungan dari bisnis tersebut. Akibatnya, ide

asuransi syariah di Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kerja sama saat melakukan bisnis dan membantu nasabah. (Riza dian kurnia, (2021) perlindungan diri, asuransi syariah, *qoala blog*).

Regulasi hukum asuransi syariah di Indonesia

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi praktik asuransi syariah dan menjaga kepentingan konsumen. Salah satu peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang

³ Pohan, K. H., Sudiarti, S., & Inayah, N. (2024). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(2), 523-532. Hal.3-5

berkaitan dengan asuransi syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Tata Cara Pembinaan Usaha Asuransi Syariah. Peraturan ini mengatur bagaimana bisnis asuransi syariah dijalankan dan dibina, termasuk penerapan prinsip syariah dalam bisnis asuransi syariah, pembentukan dan pengelolaan dana asuransi syariah, dan pengawasan dan pengendalian operasi asuransi syariah. (Ojk tentang penerapan tata Kelola bagi bank umum. [Diakses 7 desember 2016](#))

Asuransi syariah di Indonesia harus memenuhi standar dan regulasi yang berlaku, menjaga integritas dan profesionalisme dalam operasi bisnis, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan berkembang dengan cepat. Regulasi hukum yang ada membantu memastikan bahwa industri ini dapat berkembang dengan adil dan stabil. (Produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk suretyship atau suretyship syariah. Diakses nomor 20 tahun 2023)

Di Indonesia, ada undang-undang lain yang mengatur asuransi syariah, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/21/PBI/2016 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Keuangan Berbasis Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi. Selain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016.

Regulasi hukum ini sangat penting untuk pertumbuhan dan stabilitas industri asuransi syariah di Indonesia. Regulasi ini memastikan bahwa praktik asuransi syariah di Indonesia memenuhi standar yang berlaku serta memastikan bahwa pelanggan menikmati semua manfaat dan jaminan yang tersedia.

Oleh karena itu, regulasi hukum memainkan peran yang sangat penting untuk pertumbuhan dan stabilitas industri asuransi syariah di Indonesia. Regulasi ini harus terus ditingkatkan dan diterapkan secara efektif untuk memastikan bahwa industri ini berkembang dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. ⁴

Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan asuransi syariah di indonesia (RM 3)

Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini hasil dari jurnal ilmiah ekonomi, manajemen dan akuntansi Vol 7 No, 1 tahun (2018). Yusuf Q

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

Pengukuran dan penilaian harta, utang, modal, dan elemen lain dari laporan keuangan akuntansi syaria'h menggunakan nilai tukar yang sedang berlaku. Dalam hal ini, Imam Malik menyatakan bahwa dalam syarikah mudarabah, jika pemilik harta ingin melakukan perhitungan harta sebelum semua barang terjual, yang dinilai adalah barang-barang yang masih tersisa berdasarkan harga jual saat itu, meskipun nilai jual yang mungkin digunakan untuk barang yang masih di pasar.

Menurut prinsip penandingan, biaya (beban) dan keuntungan (pendapatan) harus diakui pada waktu yang sama. Hubungan yang menggambarkan hubungan sebab-akibat antara pendapatan dan biaya dapat menghasilkan hubungan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan PT. Bank Mandiri Syariah Kota Palopo terkait dengan tanggung jawab individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik. Tanggapan responden tentang pengambilan keputusan pembiayaan bank berdasarkan partai atau golongan pada bank mandiri di Kota Palopo ditunjukkan dalam Tabel 1. Jawaban responden dengan skor tertinggi dalam kategori 5 sangat sesuai, memberikan 46,67% dari total frekuensi 30. Mereka berpendapat bahwa penerapan prinsip Partai atau Golongan saat memilih pembiayaan Kejelasan dalam pengambilan keputusan keuangan bisnis akan diberikan oleh bank mandiri Kota Palopo.

⁴ Maharani, A. M., & Khasanah, U. (2021). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 3(1), 82-89. Hal 4-5

Untuk membandingkan hasil pencapaian pada bank mandiri di Kota Palopo, lihat Tabel 1 untuk tanggapan responden terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan.

No	Kategori	Tanggapan Responden	Persentase %
1	Sangat sesuai	14	46,67
2	Sesuai	9	30,00
3	Kurang sesuai	5	16,67
4	Ragu-ragu	2	6,67
5	Sangat tidak sesuai	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber: Yusuf Q, Jurnal ilmiah ekonomi, manajemen dan akuntansi Vol 7 No, 1 tahun (2018).

Tabel 2 menunjukkan tanggapan responden mengenai laporan pertanggung jawaban keuangan bank mandiri, yang menyatakan bahwa transparansi keuangan memungkinkan untuk mengetahui keberlangsungan keuangan seseorang.

No	Kategori	Tanggapan Responden	Persentase %
1	Sangat sesuai	11	37
2	Sesuai	13	43
3	Cukup sesuai	4	13
4	Tidak sesuai	2	7
Jumlah		30	100

Sumber: Yusuf Q, Jurnal ilmiah ekonomi, manajemen dan akuntansi Vol 7 No, 1 tahun (2018).

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 2, tanggapan responden terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan bank mandiri di Kota Palopo menunjukkan bahwa kategori jawaban yang diberikan responden dengan skor paling tinggi, yaitu 4, sangat sesuai dengan jawaban yang diberikan 43%, yang memiliki frekuensi 13 dari total 30 jawaban.

Mereka percaya bahwa dengan laporan pertanggung jawaban yang jelas dari bank mandiri di Kota Palopo, pengambilan keputusan perusahaan akan lebih mudah di masa depan.

Tabel 3 menunjukkan tanggapan responden mengenai laporan pertanggung jawaban keuangan Bank Mandiri tentang kemampuan untuk memenuhi hutang jangka panjang.

No	Kategori	Tanggapan Responden	Persentase %
1	Sangat sesuai	10	33
2	Sesuai	9	30
3	Cukup sesuai	7	23
4	Tidak sesuai	4	13
Jumlah		30	100

Sumber: Yusuf Q, Jurnal ilmiah ekonomi, manajemen dan akuntansi Vol 7 No, 1 tahun (2018).

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 3, tanggapan responden terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan Bank Mandiri Dapat Memenuhi Hutang Jangka Panjang Bank Dengan Prinsip-Prinsip Partai atau Golongan di Bank Mandiri di Kota Palopo menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skor tertinggi dalam kategori 5 sangat sesuai dengan jawaban responden 33%, yang menerima skor 10 dari total 30 jawaban. Karena laporan pertanggung jawaban keuangan yang jelas memudahkan perusahaan untuk membuat keputusan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik menyebabkan krisis ekonomi. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang efektif harus dibuat segera agar segala masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Menjadi sadar bahwa tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu dan usaha yang terus menerus. Selain itu, perlu juga dibangun kesepakatan dan optimisme yang tinggi dari seluruh bangsa untuk

menumbuhkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik. Ini melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta, dan masyarakat madani. Hasilnya menunjukkan bahwa Tanggapan Responden terhadap Keterbukaan Laporan Keuangan Bank Mandiri di Kota Palopo Tabel 4 berikut memberikan lebih banyak informasi:

Tabel 4 menunjukkan tanggapan responden mengenai transparansi laporan keuangan Bank Mandiri di Kota Palopo.

No	Kategori	Tanggapan Responden	Persentase %
1	Sangat sesuai	12	40
2	Sesuai	17	50
3	Cukup sesuai	1	7
4	Tidak sesuai	0	0
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4 tentang tanggapan responden mengenai keterbukaan laporan keuangan bank mandiri di Kota Palopo, jawaban yang paling banyak diberi skor 4 kategori jawaban, yang merupakan persentase 57% dari total frekuensi responden, yang mencapai 17 dari total 30. Mereka mengatakan bahwa dengan membuat laporan keuangan terbuka di bank mandiri di Kota Palopo, pimpinan perusahaan akan lebih mudah membuat keputusan.⁵

Apa dampak adopsi teknologi (insurtech syariah) terhadap penerapan akuntansi syariah dan pengelolaan keuangan di perusahaan asuransi syariah di indonesia (RM 4)

Perkembangan Teknologi Di Industri Keuangan Dan Asuransi

1. Digitalisasi Proses Bisnis: Sebagai hasil dari revolusi digital, industri keuangan dan asuransi mulai mengadopsi digitalisasi dalam berbagai operasi dan tugas, seperti pendaftaran nasabah, penerbitan polis, pengelolaan klaim, dan pembayaran melalui platform digital. Digitalisasi proses bisnis meningkatkan produktivitas, mempercepat waktu tanggap, dan mengurangi biaya administrasi.
2. Kecerdasan Buatan (AI) adalah salah satu teknologi yang paling memengaruhi sektor keuangan dan asuransi. Analisis risiko, deteksi penipuan, dan personalisasi produk adalah contoh tugas kompleks yang diotomatiskan oleh kecerdasan buatan. Sistem dapat belajar dari data dan membuat keputusan yang lebih baik dengan algoritma pembelajaran mesin.
3. Internet of Things (IoT) adalah istilah yang mengacu pada jaringan perangkat yang terhubung ke internet dan memiliki kemampuan untuk berbagi data. Dalam industri asuransi, IoT digunakan untuk memantau aktivitas dan perilaku pelanggan secara real-time. Misalnya, bagaimana pelanggan mengemudi dalam asuransi kendaraan atau bagaimana mereka melakukan aktivitas fisik dalam asuransi kesehatan. Data ini digunakan untuk penilaian risiko yang lebih akurat dan untuk menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pelanggan.
4. Big Data Analytics: Pengolahan dan analisis data skala besar menjadi penting karena jumlah data yang terus meningkat. Industri keuangan dan asuransi menggunakan analitik data besar untuk memahami pola perilaku konsumen, menemukan peluang bisnis, dan

⁵ Anwar, S. M., & Sunarti, S. (2019). PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENJAGA AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAHKOTA PALOPO. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1).

meningkatkan prediksi risiko. Analisis ini membantu dalam membuat pilihan yang lebih baik dan menyesuaikan produk.

5. Teknologi blockchain, yang dikenal oleh cryptocurrency seperti Bitcoin, menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Di industri asuransi, blockchain dapat digunakan untuk mengelola kontrak asuransi secara terdesentralisasi, menjaga data aman, dan mempercepat penyelesaian klaim.
6. Fintech dan Insurtech adalah istilah untuk perusahaan startup yang membuat solusi teknologi untuk layanan keuangan dan asuransi. Fintech dan insurtech mendorong inovasi dan persaingan di industri ini dengan menawarkan produk dan layanan inovatif seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan asuransi berbasis teknologi. Perkembangan teknologi ini telah sangat mengubah industri keuangan dan asuransi. Perusahaan yang memanfaatkan teknologi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal efisiensi, personalisasi produk, manajemen risiko, dan pengalaman pelanggan. Namun, masalah seperti keamanan data, kepatuhan terhadap undang-undang, dan transformasi budaya organisasi adalah bagian dari implementasi teknologi.

Dampak Teknologi Pada Operasional Asuransi Syariah Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi

Bisnis asuransi syariah telah sangat berubah karena kemajuan teknologi. Ini telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor ini. Digitalisasi proses bisnis adalah efek utama, yang memungkinkan otomatisasi berbagai tugas administrasi dan pengelolaan data yang lebih terintegrasi, yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Pertama, digitalisasi proses bisnis memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk mengotomatisasi sejumlah prosedur manual yang sebelumnya dilakukan secara tradisional. Segala sesuatu dapat dilakukan secara digital melalui sistem dan platform online, termasuk pendaftaran nasabah baru, penerbitan polis asuransi, dan pengajuan dan pemrosesan klaim. Selain menjadi lebih cepat dan efektif, proses ini juga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan memberikan waktu tanggap yang lebih cepat kepada klien. Selain itu, karyawan lebih produktif setelah tugas administrasi diotomatisasi. Dengan mengurangi pekerjaan manual yang berulang, karyawan dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya mereka untuk pekerjaan yang lebih berharga, seperti layanan pelanggan, pemasaran, dan pengembangan produk baru. Selain itu, otomatisasi mengurangi biaya tenaga kerja dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Selain itu, teknologi memungkinkan integrasi sistem dan manajemen data yang lebih baik dalam industri asuransi syariah. Data dari berbagai sumber, seperti pendaftaran pelanggan, polis, klaim, dan pembayaran, dapat dikonsolidasikan dan dikelola dengan lebih baik dengan menggunakan sistem informasi terpadu. Ini meningkatkan akurasi data, mengurangi risiko redundansi atau inkonsistensi, dan memudahkan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, integrasi sistem memungkinkan berbagi data dan kerja sama antar departemen atau bahkan dengan mitra bisnis seperti penyedia layanan kesehatan, agen asuransi, atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih lancar dan meningkatkan efisiensi proses bisnis secara keseluruhan. Meskipun ada keuntungan, adopsi teknologi dalam bisnis asuransi syariah juga memiliki tantangan. Perusahaan harus mematuhi peraturan dan prinsip syariah saat menggunakan teknologi baru untuk melindungi data dan privasi pelanggan. Untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi, infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan transformasi budaya organisasi diperlukan. Asuransi syariah dapat memanfaatkan keuntungan dari teknologi sambil mempertahankan prinsip syariah dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Ini dapat dicapai dengan mengambil teknologi secara bijak dan mempertimbangkan tantangan yang ada. Langkah ini akan membantu industri asuransi syariah tetap relevan dan kompetitif di era teknologi yang terus berkembang ini.

Dampak Teknologi Pada Produk Dan Layanan Asuransi Syariah

Dengan kemajuan teknologi, industri asuransi syariah telah mengalami perubahan besar dalam hal operasi dan produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah. Dengan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), big data analytics, dan platform digital, ada peluang baru untuk membuat produk dan layanan yang lebih inovatif, personalisasi, dan lebih baik untuk pengalaman pelanggan. Salah satu dampak utama teknologi adalah kemampuan perusahaan asuransi untuk menyesuaikan produk asuransi syariah dengan kebutuhan, risiko, dan preferensi setiap pelanggan dengan menggunakan kecerdasan buatan dan analitik data besar. Perusahaan asuransi dapat membuat produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan risiko setiap pelanggan dengan menganalisis data tentang perilaku, demografi, gaya hidup, dan riwayat kesehatan mereka. Hal ini memungkinkan penetapan harga yang lebih akurat dan kompetitif, serta cakupan perlindungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik pelanggan. (Muh fajrul falah. Media asuransi news. *Masa Depan Industri, Perusahaan Asuransi di Asia Mulai Rangkul*. 22 januari 2024).

Selain itu, produk asuransi syariah yang lebih beragam dan inovatif dapat dibuat dengan bantuan teknologi. Misalnya, perusahaan asuransi dapat menawarkan produk asuransi berbasis gaya hidup sehat (health-based insurance) yang memberikan premi yang lebih rendah kepada pelanggan yang mengikuti gaya hidup sehat. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan data dari perangkat IoT seperti sensor dan peralatan pemantauan. Selain itu, teknologi blockchain dapat digunakan untuk mengembangkan produk asuransi mikro (micro-insurance) yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan proses yang lebih sederhana. Selain itu, adopsi teknologi meningkatkan pengalaman pelanggan dengan perusahaan asuransi syariah. Klien dapat dengan mudah mengakses informasi produk, mengajukan klaim, melakukan pembayaran, dan berhubungan dengan pihak asuransi melalui aplikasi seluler, portal web, dan platform digital lainnya. Semua ini tanpa harus mengunjungi kantor secara langsung.

Hal ini membantu pelanggan mengelola polis asuransi mereka dengan lebih mudah dan efisien. Melalui fitur seperti chatbot, asisten virtual, dan layanan pelanggan berbasis AI, teknologi juga memungkinkan layanan yang lebih responsif dan personalisasi. Layanan ini dapat memberikan saran dan rekomendasi yang lebih relevan serta membantu menyelesaikan masalah atau pertanyaan dengan lebih cepat dan akurat dengan memahami pola interaksi pelanggan dan preferensi mereka. Adopsi teknologi dalam produk dan layanan asuransi syariah membawa beberapa keuntungan, tetapi juga beberapa tantangan. Perusahaan harus memastikan bahwa produk dan layanan baru mereka tidak melanggar syariah, seperti menghindari gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga).

Selain itu, keamanan dan privasi pelanggan juga harus menjadi perhatian utama. Ini terutama berlaku ketika data pribadi dikumpulkan dan dianalisis untuk menyesuaikan produk. Perusahaan asuransi syariah harus bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prinsip syariah ketika mereka membuat barang dan jasa baru. Diperlukan juga investasi dalam infrastruktur teknologi yang aman dan terpercaya serta pelatihan sumber daya manusia untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

Asuransi syariah dapat tetap kompetitif dan relevan di era digital yang terus berkembang sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan membiarkan bisnisnya berkembang biak dengan mengadopsi teknologi secara bijak dan mempertimbangkan tantangan yang ada. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan peluang untuk menyesuaikan produk, mengembangkan produk inovatif, dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan digital yang efisien dan responsif.⁶

⁶ kadeli, W. Y., Hasanah, M., & Purwanto, M. A. (2024). ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP ASURANSI SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(3), 200-205.

Apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia dalam penerapan akuntansi syariah (RM 5)

Peluang

Menurut penelitian yang dilakukan oleh PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH BUMI PUTERA CABANG JAMBI, pengaruh peluang terhadap agen adalah sebagai berikut: kekuatan + peluang (SO) = 2,99, dan peluang + kelemahan (WO) = 2,87. Oleh karena itu, pemasaran produk asuransi syariah memerlukan pendekatan yang tepat. Peluang adalah sebuah kesempatan untuk bertindak dan mencapai sesuatu. Dalam bahasa Inggris, peluang disebut "peluang", dan menurut KBBI, artinya adalah "kesempatan". Peluang secara sederhana berarti kesempatan muncul atau terjadi pada satu peristiwa. Dengan kata lain, peluang adalah sebuah atau beberapa kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau "moment". Oleh karena itu, asal dari peluang adalah kesempatan yang terjadi dan berkembang menjadi ide bagi seseorang.

Tantangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan + Ancaman (ST) adalah 2,31 dan Kelemahan + Ancaman (WT) adalah 2,19. Dibutuhkan strategi yang tepat karena potensi tantangan dan risiko yang ditimbulkan oleh pengaruh agen dalam pengembangan produk asuransi bumi putra jambi masih sangat kecil. Perusahaan menghadapi banyak tantangan dan peluang. Tantangan adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk membangun bisnis baru dan menemukan cara untuk berhasil. Mereka juga sering menghadapi risiko. Mereka yang mampu menghadapi kesulitan adalah mereka yang dapat menemukan berbagai peluang dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengubah peluang tersebut menjadi keuntungan.⁷

1. Upgrade Kompetensi Dewan Pengawas Syariah: Di Indonesia, dewan pengawas syariah berasal dari berbagai latar belakang, termasuk bankir dan ulama. Dewan pengawas syariah yang berasal dari latar belakang praktisi (bankir) cenderung hanya memiliki pemahaman Syariah, sedangkan dewan pengawas syariah yang berasal dari latar belakang praktisi (bankir) lebih memahami akuntansi, keuangan, teknis audit, dan merek. Oleh karena itu, tantangan pertama yang dihadapi oleh auditor syariah di Indonesia adalah meningkatkan kemampuan mereka agar produk yang sedang berkembang tidak menyimpang dari prinsip dan aturan Syariah. Kemampuan ini harus ditingkatkan dengan membankirkan ulama dan mengulamakan bankir. Di mana dewan pengawas syariah yang berasal dari latar belakang praktisi (bankir) diikutkan dalam pelatihan Syariah. Selain itu, dewan pengawas syariah yang berasal dari keluarga ulama mengikuti pelatihan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) yang disediakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuannya adalah agar dewan pengawas syariah dapat memenuhi kebutuhan industri dalam hal pemahaman akuntansi dan keuangan serta pemahaman syariah. Namun, beberapa dewan pengawas syariah tidak merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sebagai contoh, banyak dewan pengawas syariah yang memahami syariah tidak merasa perlu mempelajari bidang lain karena mereka percaya bahwa syariah adalah bidang yang paling murni. Meskipun menjadi auditor syariah atau dewan pengawas syariah seharusnya memiliki pemahaman tentang akuntansi, keuangan, dan syariah, hal ini menjadi tantangan yang nyata. Selain itu, dewan pengawas syariah harus mampu menciptakan fatwa dan produk baru. Mereka tidak hanya harus menstempel, tetapi juga harus menemukan fatwa yang menyelesaikan masalah produk yang sedang berkembang. Saat ini, tantangan tersebut sangat penting karena industri syariah di Indonesia telah berkembang di setiap aspek. Namun, tidak mudah untuk menemukan sumber daya manusia baru lulus yang berpengalaman.

⁷ Rusliani, H., & Fielnanda, R. (2022). PELUANG DAN TANTANGAN AGEN DALAM MENINGKATKAN NASABAH ASURANSI SYARIAH (STUDI PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH BUMI PUTERA CABANG JAMBI). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 81-89.

2. Kerjasama DSN-MUI Dengan OJK untuk Menciptakan Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang Wajib Mengingat kebutuhan sertifikasi saat ini dan pentingnya sertifikasi auditor syariah untuk mengukur profesionalitas dan kemahiran dalam melakukan audit syariah. Selain itu, ada masalah bahwa dewan pengawas syariah di Indonesia tidak bersedia melakukan tahapan sertifikasi, dan sertifikasi sifatnya masih belum lengkap. Problem di atas berkaitan dengan kerja sama antara DSN-MUI dan OJK dalam pembuatan sertifikasi auditor syariah yang diperlukan. Dengan bantuan OJK, DSN-MUI memastikan bahwa seluruh dewan pengawas syariah mengikuti tiga tingkat sertifikasi: inti, intermediary, dan advance. Sertifikasi yang memaksa dewan pengawas syariah menjadi disiplin industri yang mengharuskan mereka memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh DSN-MUI dengan OJK dan tuntutan tersendiri untuk pengembangan individu dewan pengawas syariah. Sertifikasi juga menjadi alat ukur keseragaman kompetensi dewan pengawas syariah sehingga nantinya dewan pengawas syariah yang berkompeten.
3. Pendidikan Mampu Memenuhi Kebutuhan Industri Terkait Dewan Pengawas Syariah Lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, sangat penting untuk menyediakan auditor syariah dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang wawasan dan keterampilan akuntansi dan syariah kepada tingkat profesional. Akibatnya, lembaga pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan industri untuk sumber daya manusia. Namun, masih ada sedikit lembaga pendidikan yang menawarkan kursus akuntansi dan audit syariah. Ini berarti bahwa auditor syariah yang ada masih terbatas. Probleminya adalah institusi pendidikan harus dapat memenuhi permintaan industri audit syariah. Sangat disarankan bagi lulusan akuntansi saat ini untuk memahami syariah sebelum memulai bekerja di lembaga keuangan syariah. Ini akan membantu mereka memperluas kemampuan dan pengetahuan mereka tentang audit dan syariah.

Menurut El Razik (2009), bagaimanapun, audit syariah berbeda dari audit konvensional. Ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan menghadapi tantangan khusus untuk mengajarkan siswa mereka yang ingin menjadi auditor syariah sebagai pekerjaan. Mereka harus memahami standar adopsi akuntansi syariah yang berbeda dari akuntansi konvensional yang digunakan oleh berbagai negara muslim dengan standar a Di Indonesia, ada tantangan bagi institusi pendidikan untuk memenuhi persyaratan industri audit syariah.

Dengan berkembangnya industri keuangan syariah, kebutuhan akan sumber daya manusia, termasuk dewan pengawas syariah, meningkat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan lulusan baru yang berkualitas dan memiliki keahlian yang diperlukan untuk dewan pengawas syariah. Selain itu, ada peluang untuk lembaga keuangan syariah dalam bidang akuntansi syariah. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan harus mampu memperbaiki atau mengarahkan kurikulum mereka saat ini untuk menekankan ilmu audit syariah. Selanjutnya, mereka harus menggunakan pendekatan teori ke praktik untuk membantu menyediakan tenaga kerja untuk auditor syariah di masa depan (Nadia dan Ahmad, 2016).

- 1) Penyedia sumber daya akuntansi dan auditor syariah;
 - 2) Upgrade Kompetensi Dewan Pengawas Syariah; dan
 - 3) memberi wawasan yang teleologikal, transendental, emansipatoris, dan humanis.
- Di antara kendala akuntansi syariah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami, memahami, dan mempraktekkan kepatihan keuangan dengan menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah. Selain itu, sulit untuk melepaskan diri dari cara berpikir dan paradigma

akuntansi keuangan konvensional yang kapitalistik. Akibatnya, penerapan prinsip dan nilai-nilai syariah yang ada dalam keuangan dianggap sulit.⁸

Tantangan dan Prospek

- 1) Tantangan: Industri asuransi Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah, termasuk tingkat penetrasi yang rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan, dan masalah dengan regulasi.
- 2) Prospek: Masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan, terutama dengan kelas menengah yang meningkat, peningkatan kesadaran akan pentingnya asuransi, dan inovasi produk asuransi digital. (Eling & Lehmann,2018)⁹

KESIMPULAN

Penerapan akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa operasi asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah, penerapan akuntansi syariah merupakan langkah penting. Dalam akuntansi syariah, nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran digunakan sebagai pedoman untuk mencatat, mengawasi, dan melaporkan transaksi keuangan. Dalam asuransi syariah, penerapan ini mencakup pengelolaan dana tabarru', yang merupakan kata untuk dana saling tolong-menolong, pembagian surplus underwriting, dan pembagian keuntungan hasil investasi sesuai dengan akad yang disepakati, seperti mudharabah atau wakalah bil ujah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) mengatur standar akuntansi syariah di Indonesia. Organisasi ini memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah mematuhi peraturan syariah dan standar akuntansi internasional. Hal ini mendukung keadilan, integritas, dan keberlanjutan sektor tersebut.

SARAN

Salah satu langkah penting untuk menjamin bahwa operasi asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah adalah penerapan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memastikan bahwa semua transaksi keuangan sesuai dengan hukum Islam karena membantu menjaga pengelolaan dana menjadi transparan, adil, dan akuntabel. Sistem ini menggunakan prinsip mudharabah untuk membagi keuntungan dan mengelola dana tabarru' (sumbangan peserta) dengan amanah. Laporan keuangan juga harus jujur saat menyampaikan informasi kepada para peserta dan pihak regulator. Untuk alasan ini, perusahaan asuransi syariah harus mematuhi standar akuntansi syariah yang berlaku, seperti PSAK Syariah, yang dibuat di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah dapat dijaga dengan penerapan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasim, A. (2021). Penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di indonesia. *Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 1-10.
- Gaswira, L., & Nabila, A. (2023). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DI INDOENSIA. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(5), 264-270.

⁸ Aditiya, W. F., Qolbi, S. W., Aiman, A. N., Widyawati, W., & Latifah, E. (2023). PELUANG DAN TANTANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(01), 11-20.

⁹ Aji, G., Rhetha, S. A., Kurniawati, E., & Zahara, L. O. (2024). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 238-250.

- Pohan, K. H., Sudiarti, S., & Inayah, N. (2024). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(2), 523-532.
- Maharani, A. M., & Khasanah, U. (2021). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 3(1), 82-89.
- Anwar, S. M., & Sunarti, S. (2019). PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENJAGA AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAHKOTA PALOPO. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1).
- Kadeli, W. Y., Hasanah, M., & Purwanto, M. A. (2024). ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP ASURANSI SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(3), 200-205.
- Rusliani, H., & Fielnanda, R. (2022). PELUANG DAN TANTANGAN AGEN DALAM MENINGKATKAN NASABAH ASURANSI SYARIAH (STUDI PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH BUMI PUTERA CABANG JAMBI). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 81-89.
- Aditiya, W. F., Qolbi, S. W., Aiman, A. N., Widyawati, W., & Latifah, E. (2023). PELUANG DAN TANTANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(01), 11-20.
- Aji, G., Rhetha, S. A., Kurniawati, E., & Zahara, L. O. (2024). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 238-250.
- Mulawarman, A. (2009). *Akuntansi Syariah dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amanda, Y. A. A. (2020). Asuransi Syariah. Yudi Amirul Aji Amanda. https://www.academia.edu/94131757/Asuransi_Syariah?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 2020.
- Kurnia, dian riza, (2021) perlindungan diri, asuransi syariah, *qoala blog* <https://www.qoala.app/id/blog/perlindungan-diri/apa-itu-asuransi-syariah/>. Diakses 1 september 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo. *Penjelasan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55 /pjok.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-Bank-Umum.aspx>. Diakses 7 desember 2016.
- AASI Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia adalah perkumpulan perusahaan - perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah Indonesia. *Produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk kejadian atau kejadian syariah*. https://www.aasi.or.id/regulasi-pojk?utm_source=chatgpt.com. Diakses nomor 20 tahun 2023.
- Falah. Fajrul Muh. Media asuransi news. *Masa Depan Industri, Perusahaan Asuransi di Asia Mulai Rangkul Al*. <https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/jadi-masa-depan-industri-perusahaan-asuransi-di-asia-mulai-rangkul-al/>. Diakses 22 januari 2024.